

# WAMEN RANGKAP JABATAN DAN UJI MATERIIL UU DI MK

Banyaknya Wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan masih menjadi sorotan masyarakat bahkan ada yang sampai mengajukan uji materiil Undang-undang (UU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini tidak hanya dilakukan satu orang saja, terbaru dilakukan oleh advokat Viktor Santoso Tandiasa. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES), Juhaidy Rizaldy Roringkon, juga sudah melakukan uji materiil namun dia terlebih dulu meninggal dunia sehingga MK memutuskan menolak permohonan tersebut. Selain itu juga ada pemohon lainnya seperti pendiri Pinter Hukum Ilhan Fariduz Zaman dan aktivis hukum A. Fahrur Rozi. Viktor resmi mendaftarkan permohonannya ke MK pada Senin (28/7/2025), meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum. Viktor menguji konstitusionalitas Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sementara itu, istana mengatakan bahwa pemerintah tidak melanggar amar putusan MK terkait rangkap jabatan pada posisi Wakil Menteri.

BACA HAL 11...

## MAHKAMAH KONSTITUSTI

WAKIL  
MENTERI

## WAMEN RANGKAP JABATAN KOMISARIS BUMN

### PT Pupuk Indonesia (Persero)

- Sudaryono – Komisaris Utama
- Immanuel Ebenezer – Komisaris

### PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

- Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama
- Ossy Dermawan – Komisaris
- Silmy Karim – Komisaris
- Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama (Telkomsel)
- Ahmad Riza Patria – Komisaris (Telkomsel)
- Juri Ardiantoro – Komisaris Utama (Jasa Marga)
- Nezar Patria – Komisaris Utama (Indosat)
- Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris (Dayamitra)

### PT Garuda Maintenance Facility (GMF AeroAsia)

- Giring Ganesha – Komisaris

### PT Bank BUMN

- Fahri Hamzah – Komisaris (BTN)
- Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama (BRI)
- Helvy Yuni Moraza – Komisaris (BRI)
- Yuliot Tanjung – Komisaris (Bank Mandiri)

### PT PLN (Persero)

- Suahasil Nazara – Komisaris
- Aminuddin Ma'ruf – Komisaris
- Taufik Hidayat – Komisaris (PLN Energi Primer)

### PT Pertamina Group

- Todotua Pasaribu – Wakomut (Pertamina)
- Arif Havas Oegroseno – Komisaris (Pertamina International Shipping)
- Ferry Juliantono – Komisaris (Pertamina Patra Niaga)
- Stella Christie – Komisaris (Pertamina Hulu Energi)
- Dante Saksono – Komisaris (Pertamina Bina Medika)

### Lainnya

- Diana Kusumastuti – Komisaris Utama (Brantas Abipraya)
- Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama (Perikanan Indonesia)
- Suntana – Komisaris Utama (Pelindo)
- Dyah Roro Esti – Komisaris Utama (Sarinah)
- Christina Aryani – Komisaris (Semen Indonesia)
- Veronica Tan – Komisaris (Citilink)

# Pemerintah : Empat Bank Plat Merah Dukung Koperasi Merah Putih

**Program pemerintah Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih mendapat dukungan kuat diantaranya likuiditas empat perbankan pelat merah. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan keempat bank itu akan memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah yaitu 6 persen.**



Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024 - 2025. (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI)

**E**mpat perbankan tersebut diantaranya, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Sri Mulyani mengatakan bahwa dukungan pemerintah melalui penyaluran akses pendanaan termasuk dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disalurkan melalui bank-bank Himbara dapat dimanfaatkan dengan bijak.

"Bank-bank tersebut, BRI, BNI, Mandiri, BSI harus melakukan tetap proper due diligent, bukan masalah jatah tiap koperasi, tapi melakukan due diligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan di dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan," ungkapnya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa desain pembiayaan ini merupakan sinergi antar kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan kapasitas usaha masing-masing koperasi. "Kita mendesain bersama-sama Himbara dan kementerian BUMN dari suku bunga hanya 6% jangka waktu 6 tahun grace periode 6-8 bulan mempertimbangkan kapasitas usaha masing-masing koperasi. Bank harus melakukan due diligence yg proper," sebutnya.

Sri Mulyano mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan target terkait pendirian 80 ribu Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yaitu supaya dapat berjalan optimal sesuai potensi bisnis di desa dan kelurahan.

"Dukungan berbagai instansi setiap kepala desa atau lurah merupakan pengawas sekaligus dari Koperasi Desa. Tidak hanya membantu legalisasi koperasi mereka

juga bertanggung jawab melatih SDM dan tata kelola koperasi sehingga koperasi dapat berjalan dengan kinerja tetap terjaga sesuai dengan tata kelola yang baik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan besaran pinjaman yang bisa diajukan koperasi merah putih. Di mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025, koperasi bisa mengajukan pinjaman hingga Rp 3 miliar.

Berdasarkan peraturan tersebut, skema pinjaman dilakukan dengan ketentuan: plafon pinjaman paling banyak Rp 3 miliar per KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan tingkat suku bunga margin atau bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar pinjaman paling lama 72 bulan.

Sementara masa tenggang pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan. Plafon pinjaman dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak sebesar Rp 500 juta.

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut maka KKMP/KDMP harus memenuhi kriteria minimal Berbadan hukum koperasi; memiliki nomor

induk koperasi; memiliki rekening bank atas nama koperasi; memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi; memiliki nomor pokok

induk berusaha; dan memiliki proposal bisnis minimal memuat anggaran biaya atas belanja operasional, tahapan pencairan pinjaman, dan rencana pengembalian pinjaman. Selain itu, Bank dapat menambahkan kriteria penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lantas bagaimanakah tata cara pengajuan pinjaman? Yaitu dengan cara pertama untuk mengajukan pinjaman, ketua pengurus KKMP/KDMP menyampaikan usulan pinjaman kepada bank dengan

persetujuan dari bupati atau wali kota untuk KKMP atau kepala desa untuk KDMP. Kemudian yang kedua usulan pinjaman harus disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/ wali kota atau kepala desa. Selanjutnya yang ketiga

berdasarkan usulan pinjaman, bank akan melakukan penilaian kelayakan pinjaman sesuai dengan ketentuan perbankan. Serta, memperhatikan plafon pinjaman untuk belanja operasional dan besaran alokasi DAU/DBH atau dana desa masing-masing kabupaten/kota atau desa.

Kemudian yang keempat adalah jika bank menyetujui permohonan pinjaman, bank melakukan perjanjian pinjaman dengan KKMP/KDMP yang minimal memuat: Besaran pinjaman; Tujuan pinjaman; Jangka waktu atau tenor pinjaman; Masa tenggang pinjaman; Suku bunga/margin/bagi hasil pinjaman; Tahapan dan syarat pencairan pinjaman; Besaran angsuran pinjaman; dan Jatuh tempo pinjaman.

Kemudian yang kelima adalah besaran pinjaman pun memperhatikan rata-rata besaran dana desa yang diterima oleh desa pada 3 tahun terakhir. Selanjutnya, keenam yaitu adapun jatuh tempo ditetapkan pada tanggal 12 setiap bulan. Jika tanggal 12 sebagaimana merupakan hari libur atau diliburkan, jatuh tempo pinjaman jatuh pada hari kerja berikutnya. Dan yang ketujuh adalah penandatanganan perjanjian pinjaman.

Untuk perjanjian pinjaman harus ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai kuasa bertindak dari bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman; Ketua pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar KKMP/DMP sebagai pihak yang menerima pinjaman; Bupati atau wali kota untuk KKMP atau kepala desa untuk KDMP sebagai pihak yang mengetahui perjanjian pinjaman

Kemudian selanjutnya, bank akan mengirimkan data perjanjian pinjaman kepada menteri melalui aplikasi yang disediakan oleh menteri paling lambat 14 hari kerja setelah perjanjian pinjaman ditandatangani. Dan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian pinjaman, dilakukan penandatanganan surat kuasa penempatan dana dari: Kepala desa atau KPA BUN penyaluran dana desa insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan untuk melakukan penempatan dana desa ke rekening pembayaran pinjaman atau bupati atau Wali kota kepada KPA BUN penyaluran dana transfer umum untuk melakukan penempatan DAU/DBH ke rekening pembayaran pinjaman. (han,ist/lut)

**"Bank-bank tersebut, BRI, BNI, Mandiri, BSI harus melakukan tetap proper due diligent, bukan masalah jatah tiap koperasi, tapi melakukan due diligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan di dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan,"**

---

**SRI MULYANI  
INDRAWATI**  
Menteri Keuangan,

# Kebobolan 4,6 Data Warga Jabar Jadi Pukulan Telak

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh

**Klaim dari akun "DigitalGhostt" di platform media sosial X, telah membobol dan menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat (Jabar) memantik reaksi keras anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengecam keras insiden kebocoran data tersebut dan menjadi pukulan telak bagi keamanan siber nasional.**

**S**oleh juga menilai pemerintah belum maksimal dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen dan memiliki kewenangan penuh, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Insiden kebocoran data warga Jawa Barat ini membuktikan bahwa perlindungan data pribadi di negara ini masih sangat minim. Ini adalah kegagalan sistemik yang menunjukkan bahwa sistem pengamanan data yang ada tidak lagi dapat diandalkan. Saya meminta pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh mengenai penyebab kebocoran data yang terus berulang. Pemerintah harus segera menunjukkan komitmen dengan membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang mandiri," ujar Oleh Soleh di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Oleh Soleh menganggap kejadian ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem perlindungan data yang dikelola oleh lembaga publik di tingkat daerah. Ia juga menyoroti lambatnya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi setelah disahkannya UU

PDP.

Menurutnya tanpa adanya lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh, penegakan hukum terhadap pelanggaran data menjadi tidak efektif. Sebab, lanjutnya, pihak yang bertanggung jawab sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya.

"UU PDP sudah memberikan mandat yang jelas. Lembaga ini harus independen, kuat secara finansial, dan memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi kepatuhan, menyelidiki kebocoran, serta memberikan sanksi. Tanpa lembaga ini, UU PDP hanya akan menjadi macan ompong," tegasnya.

Oleh Soleh menuntut pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak hanya fokus pada penanganan insiden kebocoran data ini, tetapi juga menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk mempercepat pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai risiko kebocoran data dan langkah-langkah perlindungan diri, serta meminta pemerintah untuk segera melakukan audit keamanan siber secara menyeluruh di semua institusi publik.

"Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terkikis jika

perlindungan data pribadi terus diabaikan. Pemerintah harus segera membuktikan komitmennya dengan membentuk lembaga yang diperlukan untuk melindungi data pribadi warga negara," tutupnya.

Pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB akun "DigitalGhostt" mengunggah quote dalam bahasa Inggris, yang mempertanyakan keamanan siber

**"Insiden kebocoran data warga Jawa Barat ini membuktikan bahwa perlindungan data pribadi di negara ini masih sangat minim. Ini adalah kegagalan sistemik yang menunjukkan bahwa sistem pengamanan data yang ada tidak lagi dapat diandalkan. Saya meminta pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh mengenai penyebab kebocoran data yang terus berulang. Pemerintah harus segera menunjukkan komitmen dengan membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang mandiri,"**

**OLEH SOLEH**  
Komisi I DPR RI

Indonesia dalam melindungi data warganya. "Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money? (Artinya: Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?)," tulis akun tersebut seperti yang dilihat Antara, Minggu (27/7/2025).

Cuitan itu disertai tangkapan layar dari sebuah forum dark web yang memuat penawaran data dengan label "4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]".

Terlihat juga logo resmi Pemprov Jabar dan tulisan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat di dalamnya, serta deskripsi data yang mencakup informasi sensitif antara lain alamat, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email dan pekerjaan.

Terpisah, pakar Keamanan Siber

dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi Rahardjo menyebutkan meski harus diverifikasi, besar kemungkinan apa yang disampaikan akun "DigitalGhostt" yang mengklaim telah membobol dan mengantongi jutaan data warga Jabar benar adanya.

"Biasanya kalau yang kayak gini biasanya sih betul ya. Tapi kita harus verifikasi dulu, tapi biasanya biasanya sih betul, betul bobol," ucap Budi saat dikonfirmasi.

Untuk diketahui, akun "DigitalGhostt" merupakan pengguna aktif forum dark web. Dia memiliki sejumlah unggahan dan reputasi tinggi dalam komunitas yang biasa digunakan untuk jual beli data hasil peretasan.

Sementara dalam cuitan akun @H4ckmanac mengungkap, bahwa "DigitalGhostt" disebut-sebut merupakan hacker yang sama yang pernah membobol 700 ribu data individu di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat membantah isu soal pembobolan data pribadi jutaan warga Jawa Barat yang diklaim akun bernama DigitalGhostt. "Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar," kata Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, Minggu (27/7/2025).

Adi menambahkan unggahan akun bernama DigitalGhostt pada media sosial X yang mengklaim telah membocorkan data warga Jabar dan menawarkan di forum darkweb tidak sesuai fakta.

"Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini," ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

"Jika terdapat hal yang meragukan, segera konfirmasi kepada instansi yang berwenang," ucapnya. (rls,ant,ist/lut)

# VIRAL REMAJA DI BONDOWOSO DIPUKULI, POLISI TETAPKAN 6 TERSANGKA

Aksi bullying terjadi lagi di Jawa Timur. Terbaru, di area persawahan Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso perundungan dengan kekerasan itu terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Polisi telah menangkap 6 tersangka.



Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono menunjukkan barang bukti tindak kejahatan perundungan.ist

**P**olisi menetapkan para terduga pelaku perundungan terhadap anak di bawah umur di Bondowoso sebagai tersangka. Ada 6 orang yang sebagian besar masih tergolong anak yang saat ini telah ditahan.

Dari 6 tersangka yang ditetapkan, 5 di antaranya adalah anak di bawah umur. Mereka masing-masing berinisial AN, MAM, RL, AF, dan MR. Sedangkan 1 orang pelaku lagi yang berusia 18 tahun bernama Fahri Amirullah Madani, warga Kecamatan Wonosari, Bondowoso.

"Dari pengakuan sementara pelaku, aksi perundungan ini dilakukan karena pelaku kesal pada korban," ujar Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono, kepada detikJatim, Senin (28/7/2025).

Rasa kesal itu, kata Harto, dilampiaskan dengan menjemput korban dan membawanya ke area sawah yang berada di Desa Pengarang, Jambesari Darussholah.

"Korban dijemput oleh mereka, lantas dilakukan kekerasan di lokasi persawahan itu," ujarnya.

Akibat tindakan perundungan itu, korban mengalami memar di sejumlah bagian tubuhnya. Terutama pada bagian kepala. Saat ini tengah dilakukan visum et repertum (VET).

"Semua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap mengikuti proses hukum berlaku," imbuh Harto.

Hanya saja, ujarnya, memang untuk penahanan bagi tersangka di bawah umur akan dibedakan tempatnya.

"Anak di bawah umur tetap kita proses. Karena kita juga ada tahanan anak-anak," tegas Harto Agung Cahyono.

Pelaku bakal disangka dengan tindak pidana pengeroyokan dan

kekerasan fisik terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan pasal 80 ayat (1) UU 17/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman hukumannya sekitar 5 tahun. Sementara barang bukti yang diamankan di antaranya yakni sepeda motor, kaos, Hoodie, celana panjang, dan handphone.

Sebelumnya, sebuah video perundungan terhadap seorang bocah

berusia belasan tahun di Bondowoso viral di media sosial. Ada 2 orang pengeroyok yang diperkirakan berusia lebih tua dari korban.

Dalam video berdurasi 1 menit 25 detik itu, kejadian berlangsung di areal persawahan.

Korban yang diketahui warga Desa Mengok, Kecamatan Pujer, tampak pasrah. Ia tidak melakukan perlawanan sedikit pun saat ditendang, dibogem, dan dipukuli berulang kali.

Selain pelaku tampak sejumlah orang remaja yang menyaksikan aksi perundungan ini dan tidak meleraikan atau menolong korban.

"Ayo kamu mengeluh. Makanya jangan sembarangan pakai. Lihat dulu. Mau nangis, kamu laki-laki," ujar pelaku perundungan dalam video itu.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (23/7/2025) lalu. Diduga pemukulan itu dipicu lantaran korban menggunakan jaket milik kelompok pelaku.

Korban tampak dipukul, ditendang hingga terjengkang oleh kedua pelaku secara bergantian sembari terus melontarkan ucapan dalam bahasa Madura yang tidak begitu jelas. (wid,ant,inf,rls/dya)

## Dari hasil pelaksanaan diversi, telah disepakati 7 poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak pelapor telah memberikan maaf secara tulus tanpa menuntut ganti rugi ataupun kompensasi materiil.
2. Para terlapor telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban.
3. Terlapor diwajibkan mengikuti program rehabilitasi dari pihak Bapas selama satu bulan penuh, didampingi oleh Polres Blitar.
4. Pihak pelapor menginginkan pendampingan pemulihan psikologis dan trauma healing.
5. Korban meminta agar pihak sekolah melengkapi sarana kamera pengawas (CCTV) sebagai bentuk pencegahan terulangnya kejadian serupa.
6. Korban juga meminta proses perpindahan sekolah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
7. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang menyatakan bahwa jika terjadi pengulangan perbuatan serupa, maka proses hukum akan dijalankan secara tegas dan mengikat terhadap pelaku.

## Bullying di SMPN Blitar Berakhir dengan Diversi

**SEMENTARA** untuk penanganan kasus perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar berakhir dengan diversi.

Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si, menegaskan bahwa Polres Blitar telah melaksanakan proses penyidikan dan gelar perkara terhadap kasus tersebut, yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.

Penanganan kasus dilakukan dengan pendekatan hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ditegaskan, setiap perkara yang melibatkan anak wajib diupayakan melalui diversi sebagai metode penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal.

"Dalam kasus ini, kami telah menetapkan 14 anak saksi sebagai anak dan pemeriksaan telah dilakukan terhadap 20 orang saksi," ujar Kapolres di hadapan awak media pada Senin (28/7/2025)

Proses diversi sendiri dilaksanakan melalui tahapan formal yang melibatkan berbagai pihak, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kejaksaan Negeri, perangkat sekolah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Kapolres menegaskan bahwa kepolisian bersama stakeholder terkait terus berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan ramah anak. Polres Blitar juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli dan tanggap terhadap potensi kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Terpisah, Pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Sri Lestari menggarisbawahi terkait pencegahan. Dia menganggap kasus ini sebagai bentuk kegagalan sistem pengawasan sekolah.

Menurutnya, keamanan peserta didik harusnya terjamin. "Sekolah

seharusnya mampu memetakan potensi adanya perundungan lebih dini. Pencegahan seharusnya menjadi langkah awal, bahkan sejak hari pertama MPLS," katanya, dikutip dari laman resmi UM Surabaya, Senin (28/7/2025).

Dalam kasus perundungan, Tari menyoroti pentingnya pendampingan bagi korban dan pelaku. Baik secara psikologis maupun hukum.

Terlebih jika pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Maka penanganan harus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. (ais,ist,rls/dya)

Korupsi Tata Kelola Minyak dan Kilang Pertamina

# DIDUGA RIZA CHALID DI MALAYSIA, NIKAHI KERABAT SULTAN

**Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin mengatakan, pengusaha minyak dan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina, Muhammad Riza Chalid berada di Johor, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto diminta membahas pemulangannya saat bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.**

28-29 Juli 2025.

"Meskipun menjadi kewajiban Pemerintah Malaysia memulangkan Warga Negara Indonesia yang bermasalah hukum, tetapi pembicaraan khusus Bapak Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim tetap diperlukan guna memastikan atau mempercepat pemulangan Riza Chalid," ujar Boyamin dalam siaran pers, Senin (28/07/2025).

Menurut dia, peran Prabowo sangat penting karena ada potensi proses pemulangan Riza Chalid ke Indonesia akan menemui banyak kendala. Pembicaraan dua kepala negara dianggap akan mempermudah penyidik dan kejaksaan agung untuk menangkap Riza Chalid.

Toh, kata dia, Indonesia dan Malaysia punya pengalaman soal pemulangan tersangka atau



Penyidik Kejagung mendatangi kediaman pengusaha Muhammad Riza Chalid yang disegel di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2025. (Dok.Ant)

narapidana. Dia merujuk pada penangkapan terpidana korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra dari Malaysia.

"Hal ini menjadi modal kuat bagi Pemerintah Indonesia guna memulangkan Riza Chalid dari Malaysia," ujar Boyamin.

Riza Chalid adalah salah satu dari total 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina dan sub holding KKKS periode 2018-2023. Dia bersama-sama para tersangka lainnya dituduh menyebabkan kerugian negara hingga Rp285 triliun.

Dia menjadi satu-satunya tersangka yang belum menjalani penangkapan dan penahanan.

Penyidik Jampidsus hanya sempat meminta Ditjen Imigrasi menerbitkan perintah pencegahan dan penangkalan. Namun, Riza kabarnya telah lebih dulu meninggalkan wilayah Indonesia. (wid,rls,bl/dya)

**Koordinator** Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Bin Saiman mengklaim punya informasi saudagar minyak tersebut telah menikah dengan salah satu kerabat kesultanan di negara bagian Malaysia.

"Pernikahan ini telah memperkuat posisi Riza Chalid di Malaysia dalam bentuk jejak digital fotonya bersama [Perdana Menteri Malaysia] Anwar Ibrahim menghadap Sultan Kedah," ujar Boyamin dikutip dari siaran pers, Senin (28/7/2025).

Dia mengklaim telah melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 26-27 Juli lalu. Dia mencoba menjadi informasi tentang keberadaan Riza Chalid untuk menjadi petunjuk bagi tim kejaksaan agung. Menurut dia, sejumlah petunjuk menyebut Riza Chalid sering berada di satu negara bagian tertentu di Negeri Jiran tersebut.

"Riza Chalid sering tinggal di kawasan negara bagian Johor dan kota Johor Bahru," ujar Boyamin.

Dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membahas pemulangan pengusaha dan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina, Muhammad Riza Chalid saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Rencananya Prabowo dan Anwar akan melakukan pertemuan bilateral Sore ini.

Sekadar catatan, Anwar Ibrahim dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk menghadiri Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Prabowo Subianto,

## Pakar Usul Kejagung Gerak Cepat Sita Aset

**TERSANGKA** kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023, Mohammad Riza Chalid, sempat absen saat dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung). Merespons itu, Kejagung dinilai harus cepat mengambil langkah terhadap Riza Chalid.

"Karena sudah masuk DPO (daftar pencarian orang) ya harus segera melakukan sita asetnya. Kecepatan kejaksaan sangat penting, sebelum aset dilimpahkan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho Hibnu, kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

Pemerintah melalui Kejagung, kata Hibnu, dalam proses hukum korupsi tidak hanya mengejar para pelakunya. Tetapi juga harus mengejar aset koruptor untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang.

Hibnu mengatakan, penetapan Riza Chalid sebagai tersangka kasus impor minyak mentah memiliki nilai yang sangat strategis. Ia merupakan salah satu pemain minyak pertama atau raja minyak pertama, sehingga mengetahui seluk beluk dan

mekanisme kecurangan dalam impor minyak.

"Menurut hemat kami, kayaknya kemungkinan dia sebagai aktornya. Nah ini yang menjadi problem, apakah sebagai aktor ataukah turut serta. Tapi paling tidak kita sebagai orang awam melihatnya sebagai pemain lama, broker minyak lama," ungkap Hibnu.

Hibnu juga melihat dukungan Presiden Prabowo kepada Kejagung dalam pemberantasan korupsi sangat luar biasa. "Penegakkan hukum sekarang sudah mendapat backup presiden lebih kuat dibanding pemerintah sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kita tidak tahu. Dukungannya sudah optimal terutama terhadap broker-broker minyak. Orang-orang minyak itu bukan orang sembarangan," imbuh dia.

Di luar kasus hukum yang menjeratnya, selama ini Riza Chalid dikenal sebagai saudagar minyak atau The Gasoline Godfather karena memiliki usaha di banyak sektor seperti perkebunan sawit, perdagangan minyak, hingga industri minuman.

Dihimpun dari berbagai sumber, salah satu perusahaan miliknya,

### PROFIL SINGKAT RIZA CHALID

- **Lahir:** 1960
- **Jaringan Bisnis:** Petral, Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, Cosmic Petroleum, PT Dwipangga Sakti Prima

### Kasus yang Pernah Terkait:

- **Kasus Minyak Zatapi (2008):** Riza diduga terlibat dalam impor 600 ribu barel minyak Zatapi oleh Petral lewat Gold Manor, perusahaan di bawah Global Resources miliknya. BPK menaksir kerugian Pertamina Rp 65 miliar. Polisi sempat menyelidiki, lalu dihentikan.
- **Audit Petral (2012-2014):** Audit KordaMentha membongkar permainan harga dalam impor migas oleh Petral. Riza diduga terkait lewat afiliasi dengan Global Energy Resources, penerima bocoran data pengadaan Pertamina.
- **Skandal "Papa Minta Saham" (2015):** Nama Riza muncul bersama Setya Novanto dalam permintaan saham Freeport. Rekaman pertemuan mereka dengan Dirut PTFI jadi bukti, tapi kasus mandek karena Kejagung gagal memanggil Riza.



yakni Global Energy Resources, bahkan pernah disebut sebagai pemasok utama minyak untuk Petral (Pertamina Energy Trading Ltd), anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura.

# Kekosongan Kasek di Kabupaten Malang Tembus 353 Kursi, Kenapa?



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji. (Ist)

**MALANG** - Sebanyak 353 Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Malang, saat ini mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah (Kasek) definitif. Dinas Pendidikan (Dindik) mengusulkan penambahan kuota diklat calon Kasek, melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2025. Langkah ini diyakini mempercepat pengisian kursi.

Kepala Dindik Kabupaten Malang, Suwadji mengatakan, posisi ratusan

kasek tersebut sementara ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Baik dari kalangan guru yang memenuhi syarat maupun kepala sekolah lain yang merangkap jabatan.

"Mayoritas yang kosong di jenjang sekolah dasar (SD) dengan jumlah mencapai 348 sekolah. Kalau di jenjang sekolah menengah pertama (SMP), hanya lima sekolah yang mengalami kekosongan kasek. Saat ini semuanya ditangani dengan penunjukan Plt," ujar Suwadji, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, tingginya kekosongan jabatan kepala sekolah ini berkaitan langsung dengan terbitnya aturan baru, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025.

Dalam regulasi tersebut, katanya, syarat kepangkatan untuk menjadi kepala sekolah dinaikkan dari minimal golongan III B menjadi III C.

Selain itu, calon kepala sekolah juga wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTP).

"Dari kekosongan yang ada, kami baru mendapat jatah kuota 47 orang dari pusat, untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah. Itu pendanaan dari APBN," kata Suwadji.

Ditambahkannya, dari total 97 peserta yang saat ini mengikuti seleksi diklat, hanya 47 orang yang akan lolos sesuai kuota. Rinciannya, sebanyak 10 orang berasal dari jenjang SMP dan 37 orang dari jenjang SD. "Jadwal pelaksanaan diklatnya masih menunggu keputusan resmi dari BBGTP," tambahna.

Mengatasi keterbatasan kuota tersebut, Dindik berencana mengajukan tambahan anggaran melalui PAK 2025. Tambahan itu ditujukan untuk mendanai diklat calon kepala sekolah dengan sumber dana dari APBD.

"Kalau diperbolehkan, kami akan mengusulkan anggaran untuk (diklat) 100 calon kepala sekolah melalui PAK 2025. Jadi paling tidak akan ada 147 formasi yang terisi pada tahun ini, 47 dari APBN dan 100 dari APBD," terang

Suwadji.

Lebih lanjut, Suwadji mengakui adanya keraguan dari sebagian orang tua siswa terhadap legitimasi Plt kepala sekolah. Kendati demikian, menurutnya hal ini tidak menimbulkan masalah serius dalam aspek administrasi pendidikan di sekolah-sekolah.

"Pada dasarnya Plt itu sah secara aturan, termasuk dalam menandatangani ijazah. Kami juga selalu memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa keberadaan Plt tidak akan mengganggu proses belajar mengajar maupun administrasi sekolah," katanya.

Suwadji juga menyinggung, seandainya tidak ada perubahan dalam aturan Permendikdasmen sebelumnya, pihaknya telah memiliki 167 calon kepala sekolah. Dari kalangan guru penggerak yang telah memenuhi syarat golongan III B.

Namun karena terbitnya aturan baru yang mensyaratkan golongan III C, maka jumlah calon yang memenuhi syarat secara otomatis menyusut. "Sekarang kan rencananya kami usulkan 100 (lewat PAK). Kekurangannya mungkin tahun depan, sekitar 200 an berarti," pungkasnya. (Santi/Dya)

## Kekerasan Anak dan Perempuan Capai 93 Kasus

### Dinsos Kota Malang Sebut Bukti Korban Kini Berani Bicara

**MALANG** - Dinas Sosial-Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, mencatat sebanyak 93 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi selama semester pertama tahun 2025. Peningkatan ini diklaim sebagai bukti korban kini mulai berani berbicara dan melapor.

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menyampaikan kenaikan kasus mencapai kisaran 50 hingga 70 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024.

"Kalau kami lihat perbandingannya dengan tahun 2024, memang ada kenaikan. Cuman dengan adanya kenaikan ini justru berdampak positif dan harus langsung kami tindaklanjuti. Karena dengan banyaknya laporan dari masyarakat, berarti masyarakat lebih berani terbuka, berani speak up," ujar Donny, Senin (28/7/2025).

Menurut Donny, rendahnya jumlah laporan pada tahun-tahun sebelumnya belum tentu menunjukkan kekerasan

tidak terjadi. Ia menilai, bisa jadi pada waktu itu korban ataupun saksi belum memiliki keberanian untuk menyampaikan kasus yang dialami ataupun disaksikannya.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinsos-P3AP2KB, bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan selama enam bulan pertama tahun 2025, ini adalah kekerasan fisik. Dikatakan Donny, tidak ditemukan laporan kasus pemasangan, namun kekerasan fisik masih mendominasi laporan yang diterima pihaknya.

"Kalau yang sudah dilaporkan ke kami itu kebanyakan kekerasan fisik. Nggak ada yang dipasung," kata Donny.

Disinggung tentang keterkaitan latar belakang ekonomi keluarga, Donny menyebut kasus kekerasan terjadi relatif merata, baik pada keluarga yang tergolong mampu maupun tidak mampu.

Selain itu, menurutnya pelaku kekerasan umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban. "Yang melakukan cenderung keluarga terdekat. Baik itu KDRT ataupun kekerasan seksual. Yang sering terjadi, pelakunya adalah keluarga

terdekat," terangnya.

Sebagai upaya pencegahan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang mengedepankan penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk perilaku. Donny menekankan pentingnya perhatian terhadap internal keluarga masing-masing.

"Jangan membandingkan pasangan sendiri dengan pasangan orang lain.

Jangan menyalahkan atau mencampuri pola asuh orang lain sebelum memastikan pola asuh dalam keluarga sendiri sudah sehat," jelas Donny.

Ditambahkannya, Dinsos juga terus mendorong edukasi kepada anak-anak tentang kekerasan dan kesehatan seksual sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kekerasan. Menurutna, sejak dini anak-anak perlu dibekali penge-

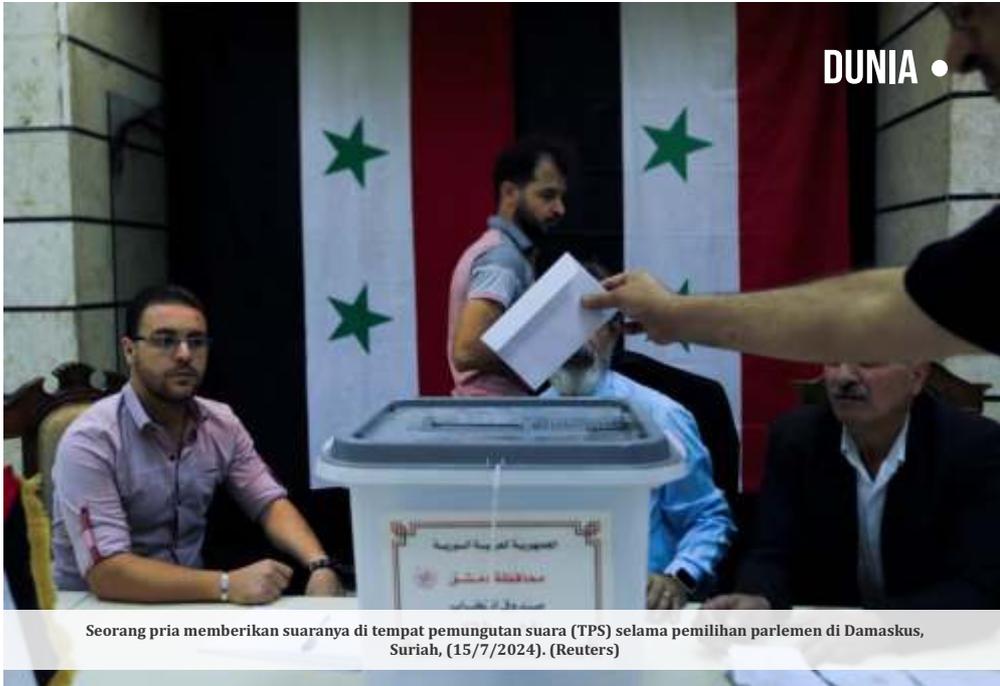


Kepala Dinas Sosial-Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito. (Santi/Lentera)

tahuan mengenai tubuh mereka, batasan yang sehat, dan jenis-jenis kekerasan.

"Edukasi seksual, kekerasan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan anak akan terus kami kenalkan. Agar mereka juga bisa memahami dan berani melapor jika mengalami kekerasan," pungkasnya. (Santi/Dya)

# SURIAH GELAR PEMILU PERTAMA SETELAH ASSAD LENGSER



Seorang pria memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) selama pemilihan parlemen di Damaskus, Suriah, (15/7/2024). (Reuters)

Suriah dijadwalkan mengadakan pemilu parlemen perdana di bawah kepemimpinan baru pada rentang 15 hingga 20 September, setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad.

**K**etua Komite Pemilu Tinggi, Mohammad Taha al-Ahmad, menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Presiden Ahmad al-Sharaa, Sabtu (27/7/) untuk memaparkan sejumlah perubahan penting dalam undang-undang pemilu sementara.

Perubahan tersebut merupakan hasil konsultasi dengan berbagai kalangan masyarakat Suriah, seperti dilaporkan kantor berita negara SANA.

Presiden Sharaa menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu di seluruh provinsi Suriah serta menolak segala bentuk pembagian wilayah, yang menurutnya ditolak oleh seluruh rakyat Suriah.

Presiden juga menegaskan pentingnya mengecualikan individu yang mendukung atau bekerja sama dengan penjahat perang, serta mereka yang menyebarkan paham sektarian atau ide pemisahan wilayah, tambah Ahmad.

Jumlah kursi di Majelis Rakyat (parlemen) akan meningkat dari 150 menjadi 210 berdasarkan sistem baru. Mengacu pada sensus penduduk 2011, alokasi kursi per provinsi juga akan disesuaikan. Presiden akan menunjuk 70 dari total 210 anggota parlemen, jelas Ahmad.

Ia menjelaskan bahwa setelah dekrit presiden tentang sistem pemilu sementara ditandatangani, komite pemilu akan membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk membentuk subkomite. Subkomite tersebut kemudian memiliki waktu 15 hari untuk membentuk badan pemilihan.

Pendaftaran calon anggota parlemen akan dilakukan setelahnya, dan para kandidat akan diberi waktu satu minggu untuk menyusun kampanye, termasuk debat dengan

badan pemilihan dan anggota komite.

Ahmad memastikan bahwa pemungutan suara akan dilakukan antara 15 hingga 20 September. Ia juga menyebutkan bahwa setidaknya 20 persen anggota badan pemilihan akan berasal dari kalangan perempuan.

Proses pemilu akan terbuka untuk pemantauan oleh organisasi

masyarakat sipil dan lembaga internasional, di bawah pengawasan Komite Pemilu Tinggi. Komite ini juga akan menjamin hak untuk menggugat daftar calon dan hasil akhir pemilu.

Pada Sabtu (26/7/2025) malam, pihak kepresidenan Suriah mengonfirmasi telah menerima versi

final dari rancangan undang-undang pemilu sementara untuk parlemen.

Pada 13 Juni, Presiden Sharaa menerbitkan dekret yang membentuk Komite Pemilu Tinggi, yang awalnya menetapkan jumlah kursi parlemen sebanyak 150, kemudian ditambah menjadi 210.

Sesuai dekret tersebut, komite bertugas membentuk badan pemilihan yang akan memilih dua pertiga anggota parlemen. Sepertiga sisanya akan ditunjuk langsung oleh presiden.

Kursi parlemen akan didistribusikan ke seluruh provinsi berdasarkan jumlah penduduk dan dikategorikan dalam daerah pemilihan khusus untuk para tokoh masyarakat dan intelektual, sesuai kriteria yang ditetapkan komite. (Anadolu, BBC, ist/nei)

## Rezim Bashar al-Assad

ASPEK	PENJELASAN
1. Gaya Kepemimpinan	Rezim otoriter terpusat pada Presiden, militer, dan intelijen.
2. Partai Penguasa	Partai Ba'ath menguasai hampir seluruh lembaga negara.
3. Kontrol Politik	Oposisi ditekan, kebebasan dibatasi, dan pemilu tidak demokratis.
4. Kebijakan Keamanan	Aparat digunakan untuk penangkapan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa.
5. Perang Saudara	Sejak 2011, menghadapi pemberontakan rakyat yang berkembang jadi perang saudara.
6. Dukungan Internasional	Didukung militer dan ekonomi oleh Rusia dan Iran.

## Arab Saudi Gelontorkan Rp 104 Triliun untuk Rekonstruksi Pascakonflik

**ARAB** Saudi resmi menandatangani kesepakatan investasi dan kemitraan senilai USD6,4 miliar (sekitar Rp104 triliun) dengan pemerintah Damaskus pada Kamis (24/7/2025), sebagai bagian dari upaya membangun kembali infrastruktur serta sektor-sektor penting yang rusak parah akibat konflik berkepanjangan selama lebih dari sepuluh tahun.

Dikutip dari Daily Times pada Senin (28/7/2025), kesepakatan itu diumumkan dalam Forum Investasi Arab Saudi-Suriah yang berlangsung di Istana Kepresidenan Damaskus, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden Sementara Ahmed al-Sharaa.

Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih mengumumkan bahwa 47 perjanjian dan nota kesepahaman telah ditandatangani, dengan dana sebesar USD2,9 miliar atau setara Rp47 triliun dialokasikan untuk proyek infrastruktur,

termasuk pembangunan tiga pabrik semen baru yang krusial untuk upaya rekonstruksi.

Perusahaan telekomunikasi Arab Saudi berkomitmen untuk menyumbang lebih dari USD1 miliar atau setara Rp16 triliun guna mengembangkan infrastruktur telekomunikasi Suriah dan meningkatkan keamanan siber.

Sektor lain seperti pertanian, keuangan, dan industri juga menonjol dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut, menandakan upaya yang luas untuk menghidupkan kembali ekonomi Suriah yang hancur.

Menteri Ekonomi Suriah Mohammed al-Shaar menggambarkan forum tersebut sebagai "tonggak sejarah" yang memperkuat hubungan persaudaraan antara kedua negara.

Perang sipil di Suriah telah menghancurkan infrastruktur negara tersebut, dengan PBB memper-

kirakan biaya rekonstruksi melebihi USD400 miliar atau setara Rp6.511 triliun.

Baru-baru ini, Amerika Serikat melonggarkan sanksi terhadap Suriah, bertujuan untuk memfasilitasi investasi internasional dan reintegrasi ke dalam ekonomi global.

Awal tahun ini, Suriah menandatangani kesepakatan energi senilai USD7 miliar atau setara Rp114 triliun yang melibatkan perusahaan-perusahaan Qatar, Turki, dan AS untuk menghidupkan kembali sektor listriknya.

Perjanjian-perjanjian ini menandai langkah penting dalam dukungan yang semakin besar dari Arab Saudi terhadap pemulihan Suriah, menyoroti upaya regional yang diperbarui untuk menstabilkan dan membangun kembali negara tersebut setelah bertahun-tahun konflik. (Daily Times, The Arab Weekly, ist/nei)

# Rutin Sauna, Efeknya Setara Olahraga Intensitas Sedang

**S**auna telah digunakan selama ribuan tahun oleh berbagai budaya di dunia, tidak hanya sebagai sarana relaksasi, tetapi juga karena diyakini memiliki manfaat kesehatan yang penting. Dalam upaya mencari metode alami untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebugaran, banyak orang menjadikan sauna sebagai pilihan yang menarik dan menyehatkan.

Tahukah Anda bahwa respons fisiologis tubuh saat berada di sauna mirip dengan yang terjadi saat berolahraga? Hal ini menjadikan sauna sebagai alternatif menarik untuk mendukung kebugaran tubuh. Beberapa efek yang dapat dirasakan antara lain peningkatan detak jantung, pelebaran pembuluh darah, dan lancarnya sirkulasi darah.

## Kesehatan Jantung dan Kardiovaskular

Penggunaan sauna secara teratur sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Menurut Dr. Young dari Cleveland Clinic, dalam beberapa menit setelah duduk di sauna inframerah, respons alami tubuh dimulai. Keringat muncul, pembuluh darah melebar, aliran darah meningkat, dan detak jantung naik. "Apa yang terjadi meniru olahraga jika Anda memikirkan fisiologinya," jelas Dr. Young.

Studi menunjukkan bahwa penggunaan sauna secara teratur dapat mengurangi risiko kematian mendadak akibat jantung, penyakit jantung koroner fatal, dan penyakit kardiovaskular fatal. Sebuah studi di Finlandia yang melibatkan 2.315 pria paruh baya selama 20 tahun

menemukan bahwa mereka yang menggunakan sauna 4-7 kali seminggu memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung 50% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang hanya menggunakan sauna sekali seminggu. Peserta yang menggunakan sauna 4-7 kali seminggu bahkan memiliki risiko 63% lebih rendah untuk kematian jantung mendadak dibandingkan dengan mereka yang menggunakan sauna sekali seminggu.

Sauna juga efektif dalam menurunkan tekanan darah. Beberapa studi telah mengaitkan penggunaan sauna dengan penurunan tekanan darah dan risiko hipertensi yang lebih rendah. Penggunaan sauna secara teratur dapat menurunkan tekanan darah diastolik, bahkan lebih signifikan bila dilakukan setelah berolahraga.

## Kesehatan Otak dan Relaksasi

Manfaat sauna tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan otak dan kognitif. Studi menunjukkan bahwa penggunaan sauna yang sering dapat mengurangi risiko demensia dan penyakit Alzheimer. Mereka yang menggunakan sauna 4-7 kali seminggu memiliki risiko 66% lebih rendah terkena demensia dan 65% lebih rendah terkena Alzheimer dibandingkan dengan mereka yang hanya menggunakan sauna sekali seminggu.

Sesi sauna juga dapat memicu respons relaksasi dalam tubuh, yang mengarah pada pengurangan tingkat stres. Panas sauna membantu mengatur hormon yang terkait dengan respons stres tubuh. Penggunaan

sauna dikaitkan dengan penurunan depresi, kecemasan, dan stres secara keseluruhan, menciptakan perasaan tenang dan damai.

## Pemulihan Tubuh dan Kekebalan

Sauna sangat membantu dalam pemulihan otot dan meredakan nyeri. Peningkatan sirkulasi darah yang disebabkan oleh sesi sauna inframerah dapat membantu mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas fisik yang intens. Sauna dapat mengurangi nyeri dan kekakuan otot, menjadikan tubuh terasa lebih segar dan siap untuk aktivitas berikutnya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sauna dapat memberikan bantuan sementara dari kondisi nyeri kronis seperti radang sendi atau fibromyalgia. Peningkatan suhu tubuh membantu mengendurkan otot, meningkatkan sirkulasi, dan mengurangi sensasi nyeri, memberikan kenyamanan yang signifikan bagi penderita.

Selain itu, terapi sauna dapat meningkatkan kesehatan pernapasan dengan melembapkan saluran napas, mempromosikan bronkodilatasi, dan mengurangi peradangan. Sebuah studi kohort 20 tahun menemukan hubungan antara mandi sauna dan penurunan risiko kondisi pernapasan akut dan kronis, termasuk PPOK, asma, dan pneumonia.

Ada bukti bahwa penggunaan sauna secara teratur dapat membantu menghindari flu biasa dan meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan berkurangnya stres dan tidur yang lebih baik, sistem kekebalan

tubuh juga menjadi lebih kuat dan mampu melawan penyakit dengan lebih efektif.

## Detoksifikasi dan Kulit Sehat

Sauna juga berperan penting dalam proses detoksifikasi tubuh. Berkeringat adalah cara alami tubuh untuk menghilangkan racun, dan sauna memperkuat proses ini secara signifikan.

Penggunaan sauna secara teratur dapat membantu menghilangkan logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri melalui keringat, mendukung proses pembersihan alami tubuh.

Tidak hanya itu, panas dan keringat yang dihasilkan saat bersauna dapat membersihkan pori-pori kulit secara mendalam.

Proses ini membantu menghilangkan kotoran dan sel kulit mati, menjadikan kulit terasa lebih bersih dan segar. Ini juga dapat meningkatkan produksi kolagen, yang penting untuk elastisitas dan kekencangan kulit.

Meskipun banyak manfaat yang menjanjikan, penting untuk diingat bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengkonfirmasi beberapa temuan ini secara definitif.

Sauna mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama individu dengan masalah kardiovaskular atau wanita hamil, yang harus mencari nasihat medis sebelum menggunakannya. Selalu pastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik saat menggunakan sauna dan hindari mengonsumsi alkohol. (nei,ist/dya)

# GELANG PINTAR META: KOMPUTER BISA DIOPERASIKAN TANPA SENTUHAN

**P**erusahaan teknologi Meta tengah mengembangkan sebuah gelang pintar yang memungkinkan pengguna mengendalikan komputer hanya dengan gerakan tangan.

Teknologi yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah kini menjadi kenyataan berkat gelang pintar buatan Meta bernama sEMG-RD. Perangkat revolusioner ini memungkinkan interaksi dengan komputer hanya melalui gerakan otot tangan, tanpa perlu menyentuh perangkat sama sekali.

Dikutip dari Tech Crunch pada Senin (28/7/2025), teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor, membuka aplikasi, hingga menulis pesan hanya dengan menulis di udara seolah-olah menggunakan pensil, menghadirkan pengalaman interaksi yang lebih intuitif dan bebas sentuhan secara langsung.

Gelang tersebut memanfaatkan teknologi bernama

surface electromyography (sEMG), yaitu teknik yang mendeteksi sinyal listrik dari aktivitas otot untuk menginterpretasikan gerakan pengguna. Teknologi ini dijelaskan dalam makalah riset yang dipublikasikan di jurnal Nature. Dengan sEMG, gelang ini mampu mengenali gerakan pengguna bahkan sebelum gerakan itu dilakukan.

Meta menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengembangan gelang ini adalah untuk menciptakan alat bantu interaksi dengan komputer yang tidak invasif, khususnya bagi penyandang disabilitas motorik.

Perusahaan juga tengah berkolaborasi dengan Universitas Carnegie Mellon untuk menguji gelang tersebut pada pasien dengan cedera tulang

belakang. Dengan alat ini, pasien tetap dapat mengoperasikan komputer meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya menggerakkan lengan atau tangan.

Profesor dari Departemen Teknik Mesin dan Neurosains Universitas Carnegie Mellon Douglas Weber mengatakan bahwa pada mereka yang mengalami kelumpuhan total di tangan, masih terdapat aktivitas otot sehingga perangkat itu tetap mampu menangkap niat gerakan pengguna.

Gelang ini juga disebut sebagai alternatif yang lebih sederhana dibandingkan teknologi seperti Neuralink, proyek milik Elon Musk yang menanamkan chip di otak untuk

membantu penderita kelumpuhan berat, karena tidak memerlukan prosedur invasif dan tetap mampu menerjemahkan gerakan atau niat pengguna ke dalam perintah digital.

Teknologi non-invasif lain, seperti headset yang menggunakan sinyal electroencephalogram (EEG), juga tengah dikembangkan sebagai sarana interaksi langsung antara otak dan perangkat digital, namun teknologi ini masih memiliki keterbatasan karena sinyal otak yang ditangkap tergolong lemah dan rentan terhadap gangguan, sehingga akurasi belum sebanding dengan metode lain yang lebih langsung atau sensitif. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**MEDIA TERVERIFIKASI**

**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Dress Batik Belahan Depan

## Perpaduan Modern dan Tradisional

**D**alam dunia fashion batik modern, gaun dengan potongan belahan depan kini semakin digemari sebagai pilihan busana kondangan karena mampu menggabungkan nuansa tradisional dengan sentuhan modern. Selain menonjolkan keindahan motif batik, desain berbelahan depan ini juga menawarkan kenyamanan dan kepraktisan, sekaligus memberikan kesan elegan yang membuat pemakainya tampil memukau dan leluasa bergerak sepanjang acara. Model dress batik dengan potongan belahan depan hadir dalam berbagai pilihan desain dan gaya, mulai dari yang minimalis hingga yang lebih berani dan penuh detail.

### Belahan Penuh dengan Kancing Depan

Tunik batik dengan desain lurus dan belahan yang dilengkapi kancing dari atas hingga bawah menciptakan ilusi tubuh yang ramping dan tinggi. Ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mempertahankan gaya klasik sekaligus menampilkan kesan elegan.

Sering kali, dress ini dirancang dengan panjang mencapai mata kaki, memberikan kesan sopan yang sangat sesuai untuk berbagai acara formal. Kualitas motif batik yang dipilih

umumnya adalah motif tradisional seperti "parang", "kawung", atau "sogan", yang tidak hanya menambah karakter budaya tetapi juga memperkuat nuansa anggun tanpa memerlukan aksesoris yang berlebihan.

### Model Peplum dan Belahan Depan

Dress batik dengan desain peplum terkenal karena kemampuannya dalam menonjolkan bentuk tubuh secara elegan. Selain itu, belahan di bagian depan memberikan sentuhan modern serta kenyamanan saat dikenakan. Dengan bagian peplum yang melebar di sekitar pinggang, dress ini menciptakan siluet feminin yang membuat pemakainya terlihat lebih proporsional. Dress ini juga sering dilengkapi dengan kancing atau resleting di bagian depan untuk sentuhan praktis dan stylish, yang menambah daya tariknya.

### Berkerah Shanghai dengan Belahan yang Elegan

Kerah shanghai yang terdapat pada dress batik menciptakan nuansa tradisional yang mendalam, sekaligus memberikan sentuhan formal yang elegan. Di sisi lain, belahan di bagian depan dress tersebut menghadirkan kesan yang segar dan modern, terbalut

dalam kekayaan budaya yang ada. Umumnya, belahan ini dimulai dari area dada yang rendah dan berlanjut hingga ke bagian bawah, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara penampilan yang sopan dan modis.

### Siluet A-Line dan Belahan Depan

Model dress batik A-line menjadi pilihan favorit karena kemampuannya untuk menciptakan siluet ramping dengan potongan yang melebar di bagian bawah. Ini sangat ideal bagi siapa saja yang ingin tampil elegan tanpa merasa khawatir dengan bentuk tubuh mereka.

"Belahan depan dengan aksen pita atau bordir mempercantik tampilan sekaligus menambah detail yang menarik." Selain itu, penggunaan bahan tambahan seperti brokat atau satin pada bagian depan dress ini semakin menambah daya tarik dan keindahan, menjadikannya pilihan yang fleksibel untuk berbagai acara, baik yang kasual maupun semi-formal.

### Desain Asimetris dan Belahan Depan

Bagi Anda yang ingin menunjukkan penampilan yang berbeda sekaligus anggun, dress asimetris dengan belahan di bagian depan dapat memberikan kesan yang dinamis dan modern tanpa mengorbankan nuansa elegan.

Dengan potongan yang lebih pendek di bagian depan dan lebih panjang di belakang, atau belahan samping yang miring, desain ini menciptakan kesan yang unik dan memberikan kenyamanan dalam bergerak.

Desain dress ini sering kali

dipadukan dengan ruffles atau kerutan di sisi belahan, menambah detail feminin yang menarik. Hal ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki tubuh kecil dan ingin menonjolkan kaki jenjang, serta menampilkan gaya yang berbeda dari biasanya. Model ini sangat tepat untuk berbagai kalangan usia yang ingin tampil stylish dan tetap sopan dalam satu kesempatan.

### Layer di Samping dan Belahan Depan yang Dramatis

Gaun batik yang dilengkapi dengan layer di sisi kanan dan kiri serta belahan di bagian depan memberikan nuansa yang mewah dan megah. Hal ini menjadikannya pilihan yang sangat tepat untuk acara pesta malam atau pernikahan yang besar.

Selain itu, layer yang menjuntai menambah volume serta menciptakan efek gerak yang lembut dan anggun saat Anda berjalan. Belahan di bagian depan menghubungkan layer dengan tubuh, sehingga menghasilkan efek visual yang sangat menarik.

### Belahan Depan Bahan Satin

Dress batik berbahan satin memberikan kesan mewah dan berkilau alami. Dengan belahan depan yang elegan, satin membuat gerakan lebih mengalir dan tampilan terlihat glamor.

Model ini ideal untuk acara malam atau kondangan mewah, terutama jika dipadukan dengan motif batik modern atau kontemporer. Kelembutan satin menambah kenyamanan saat dikenakan dalam waktu lama. (nei,ist/dya)

- 
- 
- 
- 
- 



**Wamen Rangkap (dari Hal 1) ...**

**V**iktor menjelaskan pada intinya, permohonannya meminta agar wakil menteri itu ditegaskan dalam amar putusan untuk dilarang rangkap jabatan, sama seperti menteri yang tidak boleh merangkap jabatan, salah satunya sebagai komisaris BUMN.

Dia menjelaskan, Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara berbunyi "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD."

Sementara itu, dalam pertimbangan Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan pengangkatan dan pemberhentian wamen merupakan hak prerogatif Presiden, layaknya menteri. Oleh sebab itu, menurut MK, wamen haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan menteri kepada menteri.

Dengan status demikian, MK menilai, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara berlaku pula bagi wamen. Kendati begitu, MK tidak memuat penegasan tersebut di dalam amar putusan karena para pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonannya tidak dapat diterima.

Karenanya, Viktor selaku pemohon merasa MK perlu memuat penegasan larangan rangkap jabatan wamen di dalam amar putusan. Ia juga mengatakan mengalami kerugian konstitusional sebagai masyarakat akibat ketiadaan penegasan dimaksud.

Lebih lanjut, Viktor mengatakan bahwa jabatan komisaris khusus di BUMN harus diemban oleh orang yang kompeten di bidangnya karena harus mengawasi serta memberikan pertimbangan dan nasihat kepada direksi perusahaan. Namun, jabatan tersebut dipegang wamen yang bisa tidak fokus dalam melakukan fungsinya, baik itu memberikan nasihat, pertimbangan terhadap direksi dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan BUMN, dan juga tidak mengawasi secara maksimal.

Dalam petitumnya, Viktor meminta MK menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan secara bersyarat dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak

dimaknai "Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan...".

Sebelum Viktor, pendiri Pinter Hukum Ilhan Fariduz Zaman dan aktivis hukum A. Fahrur Rozi juga mengajukan permohonan serupa. Kedua pemohon itu mengajukan permohonan uji materiil Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara serta Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Mengutip Antara, Ilhan dan Fahrur meminta MK menyatakan frasa "menteri" pada Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "menteri dan wakil menteri".

Adapun Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang BUMN berisi larangan rangkap jabatan dewan komisaris BUMN. Mereka meminta MK memperluas larangan tersebut, termasuk dilarang merangkap jabatan struktural dan fungsional pada kementerian lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Permohonan Viktor saat ini masih pada tahap registrasi dan belum memiliki nomor perkara, sementara permohonan Ilhan dan Fahrur telah diregistrasi sebagai Perkara Nomor 118/PUU-XXIII/2025.

Sebelumnya, MK juga telah mengucapakan putusan perkara dengan pokok permohonan yang sama, yakni Perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohonnya, Juhaidy Rizaldy Roringkon, tidak memiliki kedudukan hukum lantaran meninggal dunia sebelum perkara diputus. Sidang putusan tersebut digelar di Ruang Sidang MK, pada Kamis (17/7/2025), yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan bahwa Pemohon Juhaidy Rizaldy Roringkon telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari RS Dr. Sutoyo Jakarta pada 22 Juni 2025 pukul 12.55 WIB. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang telah meninggal dunia tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dalam pengujian undang-undang di MK harus relevan dan berkesinambungan dengan keberadaan Pemohon.

"Mengingat syarat lain yang juga dipenuhi dapat diberikan kedudukan hukum oleh Pemohon adalah apabila permohonan dikabulkan maka

anggapan hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak lagi akan terjadi. Dengan demikian, karena Pemohon telah meninggal dunia maka seluruh syarat anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum yang bersifat kumulatif tidak terpenuhi oleh Pemohon," jelas Saldi saat membacakan pertimbangan hukum.

Sebelumnya, Juhaidy Rizaldy Roringkon (Pemohon) menguji konstitusionalitas Pasal 23 UU Kementerian Negara yang berbunyi, "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah".

Menurut Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 17, Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945. Pemohon merasa dirugikan karena tidak adanya larangan bagi wakil menteri untuk merangkap jabatan. Hal ini menyebabkan praktik rangkap jabatan kian dipandang sebagai hal lumrah dalam penyelenggaraan pemerintah kekinian. Rangkap jabatan sendiri merupakan kondisi dimana seseorang menempati lebih dari satu jabatan pada waktu yang bersamaan, baik bidang yang sama maupun berbeda.

Kondisi rangkap jabatan ini menurut Pemohon, berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun hal ini bukan merupakan suatu tindak pidana, namun konflik kepentingan dalam bentuk rangkap jabatan menghadirkan kerentanan-kerentanan tersendiri apabila tidak diregulasi secara ketat. Misalnya, kekhawatiran mengenai integritas pengambilan keputusan atau proteksi kepentingan dari publik serta pemegang saham untuk konteks privat.

Pemohon dalam naskah permohonannya pun mengutip Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah sebenarnya telah melarang wakil menteri rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. Alasannya, posisi wakil menteri adalah sama dengan menteri yang diangkat oleh Presiden sehingga harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU Kementerian Negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan frasa "Menteri" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak

berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri dan Wakil Menteri". Sehingga Pasal 23 UU Kementerian Negara menjadi berbunyi: "Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah".

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Lampung (Unila), Prof Rudy Lukman, mengaku optimis Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan.

"Saya sendiri optimis permohonan ini dikabulkan karena MK sendiri sudah memberikan petunjuk melalui pertimbangannya," kata Prof Rudy dikutip NU Online Senin (28/7/2025).

"Ya sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya kalau permohonan sebelumnya dinyatakan tidak diterima karena pemohon meninggal dunia. Namun MK memberikan petunjuk bahwa permohonan ini bisa dikabulkan melalui pertimbangannya," tambah Prof Rudy.

Menurutnya, termasuk pernyataannya sebelumnya, putusan yang terakhir tidak dapat dianggap mengikat karena memang tidak terdapat amar putusannya. Ia menyampaikan bahwa argumen tersebut juga digunakan oleh pemerintah termasuk MPR untuk tidak melarang wamen merangkap jabatan.

Sementara itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menganggap peluang dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 terletak pada dalil kerugian yang ditimbulkan dari rangkap jabatan itu.

"Juga dalil pasal dalam UUD 1945 yang sebelah mana menjadi rujukan pertentangan konstitusional dengan frasa pasal UU yang diajukan oleh pemohon," jelasnya.

Dukungan agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juga disampaikan oleh alumnus Fakultas Dirasat Islamiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Izzatur Rahman Pradiatma. Ia juga menyayangkan masih banyaknya birokrat yang merangkap jabatan. "Saya mendukung, dikarenakan negara kita tidak kekurangan putra atau putri terbaik," katanya. (abh,ant,ist/lut)

# Sebanyak 160 Guru Sekolah Rakyat Mundur

## Pengamat : Peringatan Gagalnya Kebijakan Penempatan

Sekolah Rakyat (SR) yang baru berjalan belum genap satu bulan sudah diguncang dengan mundurnya sekitar 160 guru dari total 1.469 guru. Dari catatan Kementerian Sosial (Kemensos) pengunduran diri karena merasa lokasi SR yang jauh dari tempat tinggalnya. Pengamat pun menilai ini menjadi peringatan atas gagalnya desain kebijakan penempatan.



**P**engamat kebijakan publik sekaligus pendiri Nalar Institute, Yanuar Nugroho, menilai kebijakan yang ditentukan oleh sistem administratif Badan Kepegawaian Negara itu terlalu sentralistik. "Kebijakan penempatan itu juga mengabaikan realitas sosial-geografis," kata dia dilansir tempo Senin (28/7/2025).

Dia mengatakan bahwa penentuan lokasi mengajar guru SR dilakukan tanpa mempertimbangkan domisili, kapasitas mobilitas, dan aspirasi personal. Kebijakan itu menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di daerah dan kesiapan individual guru. Kemudian, dia menandakan bahwa jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, maka masalah ini mencerminkan kegagalan ganda, yaitu absennya mekanisme partisipatif dan lemahnya koherensi lintas sektor.

Dia menandakan, seharusnya kebijakan penempatan tenaga pengajar di SR melibatkan partisipasi guru dan pemerintah daerah. Karena itu, dia berujar guru yang melamar menjadi tenaga pengajar di SR harusnya diberikan ruang pilihan lokasi.

Yanuar juga mengkritik respons pemerintah yang menyebut telah menyiapkan guru cadangan pengganti. Menurut dia, pernyataan itu memperlihatkan cara pandang yang sempit dan teknokratis. Dia melanjutkan, pemerintah seolah hanya memandang masalah ini hanya perihal suplai. Padahal, kata dia, relasi sosial antara guru dan komunitas tempat mengajar jauh lebih penting.

Dia mendorong agar pemerintah

segera memperbaiki arsitektur kebijakan penempatan guru SR secara menyeluruh. "Tanpa koreksi serius dan perubahan cara pandang terhadap guru, Sekolah Rakyat hanya akan jadi proyek di atas kertas yang kehilangan makna," katanya.

Kemudian kritik serupa juga diutarakan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Dia menilai ada pengabaian dari pemerintah ihwal kebijakan penempatan guru hingga menyebabkan ratusan dari mereka mengundurkan diri. Menurutnya, pemerintah seolah menutup mata terhadap fakta bahwa penempatan guru yang jauh adalah gejala dari masalah yang lebih besar.

Dia melanjutkan, seharusnya penempatan guru dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial-ekonomi lokal. Selain juga harus melibatkan pemerintah daerah. "Pemerintah pusat tidak bisa memaksakan penempatan berdasarkan sistem yang seragam untuk seluruh wilayah. Data dan informasi dari daerah krusial untuk penempatan yang efektif," kata Ubaid.

Selain itu, dia menilai guru juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses penentuan penempatan. Pelibatan ini bisa dilakukan lewat mekanisme konsultasi dan survei

preferensi. Tujuannya, kata Ubaid, menyalurkan aspirasi para guru sehingga tercipta rasa kepemilikan dan komitmen terhadap program Sekolah Rakyat.

Ubaid khawatir program SR ini hanya dijadikan proyek coba-coba.

Hal ini berimbas pada siswa dari kalangan miskin yang seolah menjadi



*"Tanpa koreksi serius dan perubahan cara pandang terhadap guru, Sekolah Rakyat hanya akan jadi proyek di atas kertas yang kehilangan makna,"*

**YANUAR NUGROHO**  
Pengamat kebijakan publik sekaligus pendiri Nalar Institute

kelinci percobaan proyek pemerintah. Padahal, kata Ubaid, seharusnya anak-anak dari golongan tak mampu itu mendapatkan pendidikan terbaik. "Mereka justru kian terpinggirkan oleh kebijakan yang seharusnya mengangkat mereka. Sistem yang sekarang tidak berkeadilan," ucapnya.

"Saya khawatir ini hanya menjadi proyek 'kelinci percobaan' yang mengorbankan anak miskin.

Pernyataan tentang 'banyak cadangan guru' justru mengukuhkan kekhawatiran bahwa program ini hanyalah sebuah proyek coba-coba," lanjutnya.

Untuk itu, Ubaid mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi penempatan guru sekolah rakyat, termasuk secara menyeluruh pada semua aspek penyelenggaraan

sekolah rakyat. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan, bukan sekadar justifikasi atas kegagalan yang ada.

"Jika pemerintah tidak segera berbenah dan mengoreksi kebijakan penempatan guru yang bermasalah ini, JPPI khawatir program ini hanya akan menjadi papan nama yang pada akhirnya menambah daftar panjang anak-anak miskin yang terpinggirkan oleh sistem yang tidak berpihak kepada mereka," ucapnya.

Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan pengganti 160 guru yang mundur dari SR dengan mengambil dari tenaga pendidikan profesi guru.

"Kita sudah proses dan Insya Allah penggantinya sudah ada, jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka itu, sehingga kadang-kadang membuat mereka mundur karena penempatannya terlalu jauh," kata Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Mensos menegaskan Kemensos tetap menghargai keputusan para guru yang mengundurkan diri dan membuka kesempatan bagi para tenaga pendidik yang lain untuk berkontribusi memberikan masa depan lebih layak bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem.

"Kita sudah proses kembali untuk membuka kesempatan kepada yang lain, karena masih ada ribuan guru yang belum penempatan, terutama mereka yang sudah proses mengikuti pendidikan profesi guru," ujar Gus Ipul, sapaan Mensos Saifullah Yusuf.

Mensos menekankan pemerintah terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Sekolah Rakyat yang baru berjalan selama dua minggu. Saat ini pemerintah terus bersinergi untuk membangun penambahan titik baru untuk Sekolah Rakyat rintisan pada akhir Juli 2025.

"Kita terus perbaiki kekurangan-kekurangannya dengan kolaborasi antarkementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kami juga setiap hari terus mengikuti perkembangannya selama 24 jam untuk menambah misalnya tenaga kependidikan yang lain, wali asrama, wali asuh yang sekarang semakin sedikit kekurangannya, jadi ini terus kita sempurnakan," paparnya. (ant,ist/lut)